

Press Release

**“The Asia – Pacific Regional Parliamentarian and
CSO Forum on MDG Acceleration and
the Post 2015 Development Agenda”**

Nusa Dua – Bali, 25 – 26 Maret 2013

1. Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan “*The Asia – Pacific Regional Parliamentarian and CSO Forum on MDG Acceleration and the Post 2015 Development Agenda*”, yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali, pada tanggal 25 – 26 Maret 2013 yang lalu. Kehadiran delegasi DPR RI dalam acara tersebut menunjukkan komitmen kuat DPR RI untuk terus mendukung agenda *Millennium Development Goals* (MDGs) dan agenda pembangunan global pasca 2015. Terlebih dengan adanya inisiatif baru yang diputuskan oleh PBB melalui *the High Level Panel of Eminent Persons* dalam penyusunan agenda pembangunan global pasca 2015 berupa pelibatan parlemen, organisasi madani masyarakat, akademisi, lembaga penelitian, dan lainnya dalam rangka penyusunan agenda pembangunan global pasca 2015.
2. Delegasi DPR RI menilai perlunya keterlibatan para stakeholder seperti parlemen, organisasi madani masyarakat, lembaga penelitian, dan lainnya dalam agenda akselerasi MDGs dan penyusunan agenda pasca 2015. Salah satu prinsip yang diusung dalam pertemuan ini adalah *inclusiveness*, bahwa untuk mencapai kesuksesan, MDGs harus melibatkan semua lapisan masyarakat sebagai actor sentral. Bahkan beberapa narasumber menekankan bahwa *Nothing for Us Without Us*, dimana agenda pembangunan pasca 2015 harus berdasarkan pada aspirasi bersama terutama masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Semua tokoh LSM baik nasional dan internasional, anggota parlemen dari Negara-negara Asia Pasifik serta, serta perwakilan dari organisasi PBB meyakini bahwa agenda pembangunan pasca 2015 harus mengusung prinsip kesetaraan dan keadilan.

3. Delegasi DPR RI memberikan kontribusi positif selama kegiatan berlangsung. Kegiatan ini merupakan momentum yang tepat dimana Indonesia bisa ikut berperan dalam menentukan agenda pasca 2015. Delegasi DPR RI menyampaikan bahwa agenda pasca 2015 perlu memasukan tujuan pengembangan energi terbarukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan energi di masa mendatang dan mengantisipasi habisnya bahan bakar minyak. Selain itu, Delegasi DPR RI juga menyarankan agar ada suatu mekanisme penguatan data yang bisa diandalkan, terutama untuk masalah kemiskinan, kesehatan serta pendidikan. Karena data yang tersedia saat ini tidak bisa diandalkan untuk menjadi dasar penyusunan indikator baru dan perencanaan program untuk agenda pembangunan pasca 2015. Delegasi DPR RI juga menggarisbawahi bahwa tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang menganut prinsip akuntabilitas dan transparansi, adalah salah satu prasyarat penting agar tujuan MDGS dapat tercapai.
4. Pertemuan "*The Asia – Pacific Regional Parliamentarian and CSO Forum on MDG Acceleration and the Post 2015 Development Agenda*" ini memiliki tujuan utama untuk mengumpulkan masukan dari para anggota parlemen dan perwakilan CSO di kawasan Asia – Pasifik untuk dikonsultasikan dengan *the High Level Panel on Eminent Persons on the Post 2015 Development Agenda*, di samping beberapa tujuan lainnya, yaitu penguatan peran dan keterlibatan parlemen serta organisasi madani masyarakat dalam agenda akselerasi MDGs dan penyusunan agenda pasca 2015.
5. Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua hari tersebut, telah dibahas berbagai isu, di antaranya : Pelajaran berharga dari implementasi MDGs, baik dari pengalaman MDGs dikawasan Asia-Pasifik maupun dari kawasan Afrika, serta membahas berbagai tema-tema pilihan lainnya, seperti : "*Incorporating Gender Equality in the Post 2015 Development Framework*", "*Universal Access to Health*", "*Children and Youth*", "*Water and Sanitation for All*", "*Governance and Human Rights*", "*Discrimination and Stigmatization*", dan lain-lain.

6. Mengenai Kerjasama Global (*global partnership*), pertemuan “*The Asia – Pacific Regional Parliamentarian and CSO Forum on MDG Acceleration and the Post 2015 Development Agenda*” ini memandang perlunya berbagai pihak yang terlibat untuk membangun kerjasama, namun format kerjasama tersebut perlu disusun dalam skema kerjasama yang lebih tepat, tidak seperti sebelumnya di mana bentuk hubungan adalahhanya dalam hubungan antara donor dan penerima. Skema kerjasama global (*global partnership*) pasca 2015 harus diarahkan untuk membina kemandirian Negara penerima donor dan penguatan kapasitas (*capacity building*) untuk memastikan agar program yang telah dibuat dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Skema kerjasama tersebut dapat berupa: *triangular cooperation, south-south cooperation, philanthropy, private-public partnership*, dan peran *NGOs (community development)*.

7. Terkait isu-isu kaum perempuan (*women-related issues*), pertemuan “*The Asia - Pacific Regional Parliamentarian and CSO Forum on MDG Acceleration and the Post 2015 Development Agenda*” ini telah mengusulkan agar model pembangunan saat ini digantikan dengan model pembangunan yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, kesetaraan, dan sebaran kemakmuran yang adil terhadap kaum perempuan. Kemiskinan dipandang sebagai hambatan dalam kemajuan kaum perempuan, karena kemiskinan mencegah perempuan untuk mendapatkan hak asasi yang telah dijamin oleh hukum. Distribusi pendapatan dan kepemilikan lahan yang tidak merata merupakan penyebab yang menjadikan kaum perempuan terus menerus teralienasi secara sosial dan mengalami kekerasan baik di rumahtangga dan di ranah publik. Oleh karena itu, prinsip kesetaraan gender dan peningkatan partisipasi perempuan dalam segala aspek harus diintegrasikan dengan semua agenda pembangunan pasca 2015. Perempuan menanggung dampak yang luar biasa dari masalah kemiskinan dan minimnya layanan kesehatan. Misalnya, ketiadaan rumah sakit bersalin di desa terpencil telah berkontribusi pada peningkatan angka kematian ibu dan anak. Sehingga pengarusutamaan gender di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, politik, serta pengambilan keputusan perlu menjadi perhatian sentral dalam agenda pembangunan pasca 2015

8. Dalam kesempatan berdialog dengan beberapa anggota *High Level Panel of Eminent Persons on the Post 2015 Development Agenda* pada tanggal 25 Maret 2013 yang lalu, Ketua DPR RI telah menyampaikan pandangan tentang perlunya melibatkan parlemen, sebagai salah satu pilar utama dalam kehidupan berdemokrasi, baik pada tingkat nasional maupun global. Poin ini juga turut ditekankan oleh para peserta dialog yang lain, yang disampaikan kepada para anggota *High Level Panel*. Ketua DPR RI memandang perlunya untuk mengambil pelajaran dari pengalaman beberapa negara yang tengah mengalami krisis politik dan militer pada beberapa waktu lalu, di mana negara tersebut mengalami kehancuran pembangunan di berbagai bidang, yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya demokrasi dalam hal penataan kekuasaan di tingkat nasional. Hal lain yang disampaikan oleh Ketua DPR RI kepada paraanggota HLP, bahwa agenda pembangunan global pasca 2015 merupakan isu bersama yang menyentuh kehidupan semua pihak dalam tataran nasional, regional dan internasional, Oleh sebab itu, sudah sepatutnya semua pihak dilibatkan, bahkan sejak awal perumusan agenda pembangunan pasca 2015, melalui kerangka kerjasama yang bersifat terintegrasi dan menyatukan semua pandangan dan harapan. Selain itu, juga dibutuhkan adanya *trust building* dari semua komponen yang terlibat, termasuk dari pemerintah (eksekutif). Partisipasi menyeluruh inilah yang akan membantu mendorong tercapainya percepatan MDGs dan penyusunan agenda pembangunan global pasca 2015.

9. Pertemuan *The Asia - Pacific Regional Parliamentarian and CSO Forum on MDG Acceleration and the Post 2015 Development Agenda* diakhiri dengan diadopsinya Deklarasi Bali. Kesepakatan bulat untuk mencapai deklarasi ini melalui perdebatan yang panjang, terutama terkait dengan rekomendasi kunci untuk menghadapi kerangka pembangunan pasca 2015. Deklarasi Bali pada dasarnya menegaskan kembali pentingnya peran parlemen, CSO dan berbagai perjanjian dan deklarasi yang mengiringinya yaitu ICPD, BPFA dan CEDAW dalam mendukung suksesnya akselerasi MDGs. Deklarasi Bali memuat beberapa rekomendasi, diantaranya; HakAsasiManusia (HAM) dan tatakelola pemerintahan yang baik perlu terus dipromosikan dan diimplementasikan sebagai suatu *key enabler* untuk mencapai tujuan pembangunan

global. Deklarasi ini juga merekomendasikan prinsip kesetaraan (*equity*) sebagai pilar pokok dalam meningkatkan layanan public yang bersifat *accessible*. Disamping itu rekomendasi lainnya adalah mengenai penguatan kerangka kerjasama global dan mekanisme pembiayaan pembangunan global yang menghimbau agar mobilisasi sumberdaya dan penyaluran(*Official Development Assistance*) ODA dapat berjalan lebih efektif baik secara kualitas maupun kuantitas.

Nusa Dua – Bali, 26 Maret 2013